

BAB VI

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Variabel ekspor minyak sawit, struktur modal dan struktur aset berpengaruh signifikan terhadap kinerja nilai perusahaan perkebunan kelapa sawit. Variabel makro ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ekspor minyak sawit dan profitabilitas perusahaan, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja nilai perusahaan dan manajemen risiko perusahaan. Variabel ekspor minyak sawit berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajemen risiko dan profitabilitas. tetapi struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajemen risiko dan profitabilitas perusahaan.
2. Variabel manajemen risiko dan profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja nilai perusahaan perkebunan kelapa sawit.
3. Variabel manajemen keberlanjutan lingkungan berpengaruh signifikan dan memperkuat pengaruh variabel ekspor minyak sawit dan variabel manajemen risiko terhadap kinerja nilai perusahaan perkebunan kelapa sawit.
5. Penerapan kebijakan RED di kawasan Uni Eropa menunjukkan bahwa pada umumnya negara anggota Uni Eropa mematuhi ketentuan yang tertuang dalam RED dengan mengurangi atau menghapus penggunaan minyak sawit, tetapi beberapa negara seperti Jerman dan Italia masih tetap mendukung penggunaan minyak sawit yang berkelanjutan.
6. Kebijakan RED berdampak langsung terhadap penurunan volume ekspor minyak sawit Indonesia, terutama ekspor ke pasar Uni Eropa.

6. Menanggapi kebijakan RED Uni Eropa, pemerintah dan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit melakukan pendekatan teknis melalui upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit agar memenuhi prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Disamping itu juga melakukan upaya diplomatik, baik bilateral maupun multilateral untuk meyakinkan konsumen Uni Eropa tentang upaya yang sudah dilakukan untuk memproduksi minyak sawit dengan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit juga melakukan sertifikasi RSPO dan ISPO. Disamping itu pemerintah Indonesia juga mengajukan gugatan atas perselisihan perdagangan dengan Uni Eropa di WTO.
7. Kebijakan pemerintah untuk mengatur ekspor minyak sawit melalui pengenaan pajak ekspor (Bea Keluar dan Pungutan Ekspor), serta *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (PMO) cukup efektif untuk menjamin ketersediaan pasokan produk minyak sawit di pasar dalam negeri dan ekspor.

6.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan implikasi yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis diperoleh temuan baru bahwa variabel moderasi manajemen keberlanjutan lingkungan mempunyai pengaruh signifikan dan memperkuat pengaruh variabel ekspor minyak sawit terhadap kinerja nilai perusahaan.
2. Kinerja perusahaan perkebunan kelapa sawit, baik dalam hal ekspor maupun nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki manajemen keberlanjutan lingkungan.

3. Perusahaan kelapa sawit harus melaksanakan manajemen keberlanjutan lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik melalui sertifikasi ISPO maupun RSPO agar produk yang dihasilkan dapat diterima di pasar internasional, khususnya pasar Uni Eropa.
4. Indonesia harus memperkuat kriteria dan standar sertifikasi ISPO setara dengan sertifikasi RSPO untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dipasar global, terutama pasar Uni Eropa.
5. Kebijakan DMO-PMO yang diterapkan pada saat ini harus dilanjutkan dengan memperhatikan perkembangan situasi pasar internasional dan domestik untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku industri pangan dan energi di dalam negeri.

6.3 Saran

1. Pemerintah dan perusahaan kelapa sawit perlu mendorong terbentuknya Tim Bersama antara Indonesia dan Uni Eropa untuk melakukan evaluasi terhadap metodologi dan kriteria dalam penghitungan ILUC agar diperoleh hasil yang lebih obyektif dan dapat diterima oleh semua pihak.
2. Pemerintah dan perusahaan kelapa sawit perlu memperkuat sistem sertifikasi ISPO dengan melibatkan *stakeholder* Uni Eropa agar produk yang telah memperoleh sertifikat ISPO mendapat penerimaan yang lebih luas di pasar global.
3. Penguatan sertifikasi ISPO perlu disempurnakan dengan mengakomodir peraturan EUDR sehingga sertifikasi ISPO dapat diperluas cakupannya, termasuk jaminan atas ketentuan anti deforestasi.
4. Pemerintah dan perusahaan kelapa sawit Indonesia perlu memperluas dan memperkuat pasar ekspor produk minyak sawit di luar negara Uni Eropa

terutama ke negara-negara Asia dan Afrika melalui kegiatan pertemuan ilmiah, pertemuan dagang maupun promosi.

5. Pemerintah dan perusahaan kelapa sawit perlu meningkatkan penggunaan produk minyak sawit dalam negeri melalui program hilirisasi, baik untuk industri pangan maupun energi agar dapat mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor.
6. Pengaturan besaran alokasi dan HET produk minyak sawit di pasar dalam negeri sebaiknya dilakukan dengan cara lebih fleksibel agar tujuan kebijakan untuk menjaga ketersediaan pasokan di dalam negeri dapat tercapai tanpa merugikan perusahaan dalam kegiatan ekspor.